

EVALUASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

EVALUATION OF VILLAGE FUNDS IN VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT

Oleh:

Hasnawati¹, Mashuri², Mega Erdawati³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimaggalatung Bone
hasnawatialimuddin@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bontojai Kecamatan Salomekko Distriks upaten Bone dan untuk mengetahui dampak Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bontojai Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yang diukur dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan (adequacy, equity, responsiveness, dan properness. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, dan member check. Teknik analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi Dana Desa Untuk Masyarakat Pemberdayaan di Desa Bontojai, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, lebih dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur dibandingkan program pemberdayaan masyarakat, meskipun setiap tahun pemerintah Desa Bontojai meningkatkan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat. Evaluasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bontojai Kecamatan Salomekko Distriks upaten Bone telah dilakukan secara efektif dan menghasilkan output yang baik dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan masyarakat Desa Bontojai masih sebagian kecil yang merasakan manfaat dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.

KATA KUNCI: *Evaluasi, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat*

ABSTRACT: *This study aims to determine the evaluation of Village Funds in Community Empowerment in Bontojai Village, Salomekko District, Bone Regency and to determine the impact of Village Funds in community empowerment in Bontojai Village, Salomekko District, Bone Regency as measured by indicators of effectiveness, efficiency, adequacy (adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. While the indicators of success in community empowerment are seen from welfare, access, critical awareness, participation and control. This type of research is descriptive qualitative research with data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. The checking of the validity of the data is done through triangulation, and member check. Data analysis techniques using data condensation,*

data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the evaluation of Village Funds for Community Empowerment in Bontojai Village, Salomekko District, Bone Regency, is more budgeted for infrastructure development than community empowerment programs, although every year the Bontojai Village government increases the budget for community empowerment programs. Evaluation of Village Funds in Community Empowerment in Bontojai Village, Salomekko District, Bone Regency has been carried out effectively and produces good outputs with community empowerment activities. And the community of Bontojai Village is still a small part who feel the benefits of the village fund in community empowerment.

KEYWORDS: *Evaluation, Village Fund, and Community Empowerment*

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa diharapkan mampu mengelola dana desa secara bijak untuk Pembangunan Desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pendayagunaan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan hakikat masalah dan kebutuhan prioritas masyarakat Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bontojai Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone dan untuk mengetahui dampak Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bontojai Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yang diukur dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan kesesuaian. Sedangkan indikator keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari kesejahteraan,

akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi

Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, dan member check Teknik analisis data menggunakan pemadatan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi Dana Desa Bagi Masyarakat Pemberdayaan di Desa Bontojai, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, lebih banyak dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur dibandingkan program pemberdayaan masyarakat, meskipun setiap tahun pemerintah Desa Bontojai menambah anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat. Evaluasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bontojai Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone telah berjalan dengan efektif dan menghasilkan output yang baik dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan masyarakat Desa Bontojai masih merupakan sebagian kecil yang merasakan manfaat dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya, termasuk

pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Implementasinya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pembangunan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan yang tegas dan konsisten mengenai anggaran pembangunan desa baik di tingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, permasalahan yang ditemukan dari pelaksanaan dana desa di Desa Bone Kabupaten adalah Pemerintah Desa tidak transparan dan juga tidak akuntabel dalam pelaksanaannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh William Dunn dalam Hariyanto (2017: 52-54) tentang evaluasi kebijakan publik yang meliputi enam indikator yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan akurasi. Serta untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang diusulkan oleh UNICEF terdapat 5 indikator yang meliputi: kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol Pemerintah Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pada tahun 2021 mendapatkan tambahan Dana Desa sebesar Rp . 124 miliar. Tahun sebelumnya hanya Rp. 100 miliar dialokasikan untuk 121 desa di Kabupaten Bone. Menurut Wirawan (2011:17), setiap kebijakan harus dievaluasi untuk menentukan apakah kebijakan tersebut bermanfaat, dapat mencapai tujuannya, dilaksanakan secara efisien dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Istilah lainnya adalah

analisis kebijakan (policy analysis). Analisis kebijakan adalah menentukan atau memilih alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada. Dan evaluasi kebijakan adalah untuk menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, dan member check. Teknik analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas

Dalam teori Dunn menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan (efek), atau mencapai tujuan tindakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Kantor Desa Bontojai Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone bahwa dengan adanya dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah Pusat ke desa sangat membantu masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan dana desa ini telah digunakan dengan baik .

Dana desa diprioritaskan untuk dua bidang, yakni pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran dana desa dalam bidang pembangunan infrastruktur diperuntukan untuk pembangunan irigasi, paving block, posyandu, jalan tani, dan sebagainya. Demikian pula

dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diadakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan menjahit, pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan keterampilan keluarga (merangkai bunga), meskipun belum semua lapisan masyarakat merasakan manfaat dana desa baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun pembangunan infrastruktur. Pemberdayaan masyarakat.

2. Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai dari program pemberdayaan masyarakat dari dana desa di Desa Bontojai Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone dalam hal peningkatan keberdayaan masyarakat, adanya program padat karya mampu membantu masyarakat meningkatkan pendapatan ekonomi dan dengan adanya BUMDes memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu. mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan berpenghasilan. Serta dengan adanya program pemberdayaan masyarakat dari dana desa ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mulyadi (2007:63) menyatakan bahwa “efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, pekerjaan) dalam melaksanakan sesuatu tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya. Efisien juga berarti perbandingan antara masukan dan keluaran atau biaya dan keuntungan”. pelaksanaan dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat masih dianggarkan di Desa Bontojai dengan melibatkan masyarakat seperti: ibu-ibu PKK, anggota simpan pinjam, dalam setiap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan.

3. Kecukupan

Hasil penelitian menemukan bahwa dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat telah memberikan dampak yang cukup positif bagi kehidupan masyarakat Desa Bontojai Kabupaten Bone khususnya terkait pendapatan ekonomi. Masyarakat juga saat ini terbantu dengan adanya dana desa serta adanya pelatihan yang diberikan dan pemberian modal usaha oleh pemerintah desa yang mengakibatkan masyarakat lebih mandiri, hal ini juga diperkuat dengan teori Dunn “kecukupan berkaitan dengan bagaimana sejauh mana tingkat keefektifan memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang” menciptakan masalah. Kriteria kecukupan menekankan hubungan yang kuat antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil kajian bahwa masyarakat Desa Bontojai Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone merasakan sesuatu yang berbeda setelah dana desa dalam program pemberdayaan ini jauh lebih baik dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan di desa tersebut. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat dari dana desa masyarakat di Desa Bontojai Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone hanya sebagian kecil masyarakat yang merasakan manfaatnya terutama masyarakat yang kurang mampu diberdayakan dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang berbeda dengan sebelum masyarakat ini program pemberdayaan.

4. Keselarasan

Teori Dunn “pemerataan terkait erat dengan rasionalitas hukum dan sosial dan mengacu pada distribusi efek dan upaya antara kelompok yang

berbeda dalam masyarakat. Kebijakan berorientasi pemulusan adalah kebijakan di mana konsekuensi (misalnya unit layanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) didistribusikan secara merata. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau layanan pendidikan terkadang didistribusikan berdasarkan kriteria kesetaraan. kriteria kesetaraan terkait erat dengan persaingan konsepsi tentang keadilan atau kewajaran dan konflik etis seputar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risiko masyarakat.

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa dana desa telah dianggarkan secara merata di setiap Dusun yang ada di Desa Bontojai. Setiap dusun mendapatkan bagian yang sama sehingga tidak ada lagi ketimpangan. Dan program pemberdayaan masyarakat dari dana desa sudah dianggarkan secara proporsional di setiap dusun. Masyarakat sangat terbantu dengan pemberdayaan ini. Masyarakat diberdayakan dengan diberikan pekerjaan untuk pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bone dan diberikan upah. Dan masyarakat diberikan modal usaha melalui BUMDes untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya.

5. Daya tanggap

Teori Dunn “responsiveness berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok orang tertentu. Kriteria responsiveness penting karena sebuah analisis yang dapat memenuhi semua kriteria lain seperti: efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan tetap gagal jika tidak menjawab kebutuhan sebenarnya dari kelompok yang seharusnya diuntungkan dengan adanya suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil kajian bahwa usulan dana desa dari masyarakat telah diakomodir dalam RPJMDes dan dituangkan dalam RKP tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat enam tahun ke depan dan yang menjadi kendala terkait terbatasnya dana desa dan menjadi kendala dalam mewujudkan apa yang telah dicanangkan. Oleh karena itu dalam RPJMDes dalam pelaksanaannya, setiap tahun mana yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan karena keterbatasan dana desa. Dan yang tertunda akan dilanjutkan di tahun berikutnya.

6. Ketepatan

Menurut teori Dunn, “kriteria kesesuaian berkaitan erat dengan rasionalitas, substantif, karena persoalan kesesuaian kebijakan tidak berkaitan dengan satu set kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria bersama-sama. Akurasi mengacu pada nilai atau harga program tujuan dan kekuatan asumsi yang mendasari tujuan tersebut”. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa tujuan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi desa, asas adil dan merata yang diharapkan masyarakat dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat karena anggaran yang terbatas sehingga harapan masyarakat belum sepenuhnya tercapai secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Bontojai Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yang telah diwujudkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan bina kesehatan, penimbangan anak, kegiatan tambahan gizi balita, dan pemberian modal usaha untuk ekonomi masyarakat yang lemah.

Berdasarkan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat, indikator pengendalian masyarakat harus ikut mengawasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat demi keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat. masyarakat harus memegang kendali untuk mengawasi kinerja pemerintah desa agar penggunaan anggaran dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat tepat sasaran dan seluruh masyarakat Desa Bontojai dapat berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bontojai Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Evaluasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bontojai Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone Kabupaten, lebih banyak dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur dibandingkan program pemberdayaan masyarakat. Evaluasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bontojai Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone telah berjalan dengan efektif dan menghasilkan output yang baik dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan masyarakat Desa Bontojai masih merupakan sebagian kecil yang merasakan manfaat keberadaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat belum mampu mensejahterakan masyarakat Desa Bone. Efektifitas pelaksanaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat telah dilakukan di enam dusun yang ada di Desa Bontojai Kecamatan Salomekko

Kabupaten Bone dengan melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. seperti pelatihan menjahit, pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan keterampilan keluarga (merangkai bunga) meskipun belum semua lapisan masyarakat merasakan manfaat dana desa dalam hal pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Juliana. 2017. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan Desa Di Kabupaten Asahan. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Eri Hariyanto. 2017. Evaluasi Kebijakan Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN. Cetak 1. Yogyakarta: Gava Media.
- Grafis Ray. 2017. Peraturan Desa Lengkap (UU RI No. 6 Tahun 2014). Cetak 1. Jakarta Timur: Sinar Graphic Offset.
- Harry Kebijakan. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Hit Bandung: Humaniora Utama Pers.
- Haryanto. 2017. Kajian Implementasi Pembelajaran Berbasis E-learning dengan pendekatan The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Jurnal Informatika Khatulistiwa, V(1), 14–20.
- Leo Agustino. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Cetak 2. Bandung: Alfabeta. Halaman 187-188.
- Mulyadi. 2007. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Cetak 3. Bandung: Alfabeta.
- Widyatama. 2014. Tinjauan tentang pengertian literatur efisiensi". . <https://repository.Widyatama.ac.id>. Diakses 26 November 2022.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Press.